



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737
Website <https://dinsos.madiunkota.go.id>.

Madiun, 2 Februari 2022

Nomor : 050/306/401.104/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 3 berkas
Perihal : Kelengkapan Data
PPID Pemabantu 2021

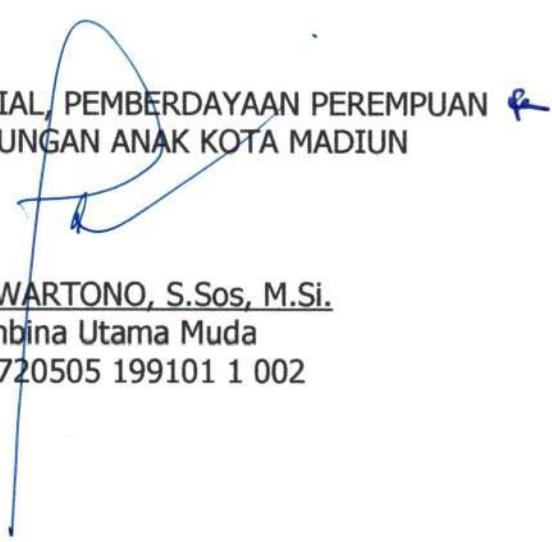
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kominfo
Kota Madiun
di
MADIUN

Menindak lanjuti surat dari Sekretariat Daerah tanggal 10 Januari 2021 Nomor : 489/0133/401.109/2021 perihal Kelengkapan Data PPID Pembantu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2021, maka bersama ini kami kirimkan data laporan sebagaimana data terlampir.

1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2022. ✓
2. Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2022. ✓
3. Laporan Layanan Informasi dan Ddokumentasi Tahun 2021. ✓

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN


HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19720505 199101 1 002

Informasi Publik														
10	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Layanan Informasi Publik dalam bentuk SP	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓							Selama Berlaku
	Seputar Madiun													
11	Seputar Kegiatan Dinas Dinas Sosial PP PA Kota Madiun	Informasi Seputar Kegiatan Dinas Sosial PP PA Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓							Selama Berlaku

Madiun, 27 Januari 2022
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun *Re*

HERI SUWARTONO, S.Sos.,M.Si.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19720505 199101 1 002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS SOSIAL PP PA KOTA MADIUN

TAHUN 2022

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 tentang Perlindungan Hak Pribadi 2. PP No. 82 Tahun 2021 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 4. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h	Dinas Sosial	Selama statusnya berhak mendapat bantuan kemiskinan Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos	Membuka rahasia pribadi ndan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi
2.	Data Identitas PMKS di Penampungan sementara/ shelter Srintit	1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 3. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h	Dinas Sosial PPPA	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui	Kerahasiaan pribadi terlindungi
3.	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dinas Sosial PPPA	Selama berstatus anak	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak
4.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dinas Sosial PPPA	Selama peraturan belum dicabut	Merampas hak asasi klien	Permasalahan bisa segera diatasi tanpa membuka aib klien

5.	Data calon pemenang lomba kegiatan	1. UU No 14 Tahun 2006 Pasal 17 tentang keterbatasan informasi publik 2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2009	Dinas Sosial PPPA	Sampai diumumkan pemenangnya	Mempengaruhi jalannya penjurian	Penjurian/ penilaian berjalan lancar	
6.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia (R) dan Konfidensial	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 80	Dinas Sosial PPPA	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga kerahasiaan data pemerintah	
7.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan yang belum diaudit oleh BPK pada tahun berjalan	UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i	Dinas Sosial PPPA	Terbatas sampai setelah selesai audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	
8.	Laporan keuangan (LK) yang belum diaudit	Instruksi Presiden NO. 7 Tahun 2015	Dinas Sosial PPPA	Terbatas sampai setelah selesai audit	Informasi belum terjamin kebenarannya	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	
9.	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan barang dan Jasa yang pelaksanaannya masih dalam proses	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa - UU NO 14 Tahun 2008 pasal 6 angka 3 huruf E tentang informasi publik yang diminta belum dikuasai / belum didokumentasikan	Dinas Sosial PPPA	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat - Dapat menghambat proses jalannya pengadaan barang dan jasa	Bisa menjadi ketidakakuratan dan obyektifitas dalam penilaian	
10.	Kode akses / user / Password aplikasi Elektronik	- UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17	Dinas Sosial PPPA	Selama password/kode berlaku	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Bisa menjadi keakuratan dan obyektifitas penilaian Keamanan data bisa terjaga dengan baik	

Madiun, 27 Januari 2022

Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKOTA MADIUN 

HERI SUWARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip 19720505 199101 1 002